



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PEMBATALAN DAN PEMBETULAN SPPT PBB DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK CIPAYUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Muhammad Ade Wardana

1902033007

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PEMBATALAN DAN PEMBETULAN SPPT PBB DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK CIPAYUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Muhammad Ade Wardana

1902033007

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

JAKARTA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Magang : Prosedur Pembatalan Dan Pembetulan SPPT PBB Di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung

Nama : Muhammad Ade Wardana

NIM : 1902033007

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

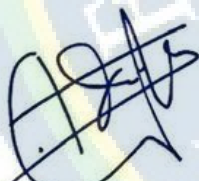
Tahun Akademik : 2021/2022

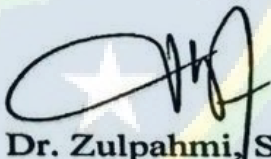
Jakarta, .../ ... / 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

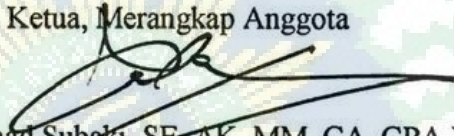
Prosedur Pembatalan Dan Pembetulan SPPT PBB Di Kantor Pelayanan Pajak
Cipayung

Nama : Muhammad Ade Wardana
NIM : 1902033007
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

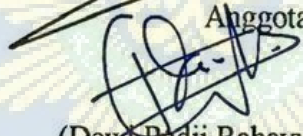
Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta

Pada Tanggal : 28 / 07 / 2022

Ketua, Merangkap Anggota

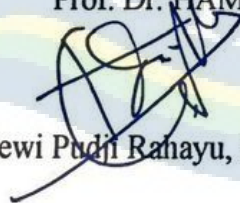

(H. Ahmad Subaki, SE., AK., MM., CA., CPA.)

Anggota

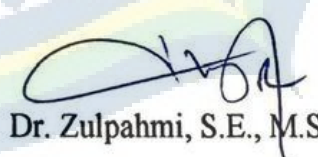

(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA


Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji beriringan dengan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis panjatkan sebab atas berkah dan karunia Nya-lah Laporan Tugas Akhir ini dapat tersusun dan selesai tepat pada waktu yang telah di ridhoi -Nya dengan judul **“Prosedur Pembatalan Dan Pembetulan SPPT PBB Di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung.”**

Tidak lupa shalawat beriringan dengan salam kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam senantiasa tercurah sebab atas syafaat yang telah diberikannya kemudian kami dapat berada pada zaman yang penuh dengan cendekiawan seperti saat ini.

Tujuan daripada dituliskannya Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai pemenuhan atas kewajiban sebelum menyandang gelar Ahli Madya dalam bidang Perpajakan (A.Md.Pjk) pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA tercinta.

Selama proses dalam menyusun sampai dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini sejatinya banyak sekali dukungan yang penulis dapatkan serta bimbingan dan motivasi yang diberikan oleh pihak-pihak luar biasa yang berada disekitar penulis. Maka dari itu izinkanlah penulis untuk memberikan ucapan atas rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr.Zulpahmi,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA (UHAMKA), sekaligus sebagai Dosen Pembimbing
3. Bapak M.Nurasyidin,S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA(UHAMKA).
4. Bapak Dr. Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA(UHAMKA).
5. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan

(D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA.

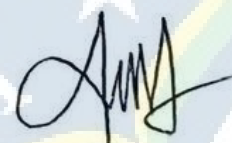
6. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, dan sahabat-sahabat yang telah menemani serta memberi dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan ini.
7. Tak lupa saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir sejatinya masih banyak sekali ketidaksempurnaan, karena hal itulah kemudian untuk kritik beserta dengan saran sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga apa yang telah dipresentasikan melalui Laporan Tugas Akhir ini mampu membawa manfaat untuk banyak pihak, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, / / 2022

Penulis,



Muhammad Ade Wardana

1902033007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	3
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	3
1.2.2 Pembahasan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	8
2.3 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	8
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	11
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	11
2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	11
2.4.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	13
2.4.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	14
2.5 Tinjauan Prosedur Pembetulan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	15

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	17
3.1 Hasil Pengamatan	17
3.1.1 Sejarah Singkat Bapenda DKI Jakarta	17
3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Cipayung	19
3.2 Hasil Pembahasan	21
3.2.1 Prosedur Pembatalan dan Pembetulan SPPT PBB Pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung	21
3.2.2 Prosedur Pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung	23
3.2.3 Kendala Pada Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembatalan dan Pembetulan SPPT PBB Pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung	28
3.2.4 Solusi dari Kendala Pada Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembatalan dan Pembetulan SPPT PBB Pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Cipayung.....	20
Gambar 2 Menu Login Pembatalan SPPT	21
Gambar 3 Menu Pembatalan SPPT Bagian Memasukkan NOP dan Tahun Pajak Pembatalan	22
Gambar 4 Menu Pembatalan SPPT Bagian Memasukkan No Hp, Email, dan Keterangan Pembatalan.....	22
Gambar 5 Menu Pembatalan SPPT Bagian Simpan Data atau Download Tanda Terima	23
Gambar 6 Menu Login Pembetulan SPPT	24
Gambar 7 Menu Pembetulan SPPT Bagian Memasukkan NOP dan Tahun Pajak Pembatalan.....	24
Gambar 8 Menu Pembetulan SPPT Bagian Memasukkan No Hp, Email, dan Keterangan Pembetulan.....	25
Gambar 9 Menu Pembetulan SPPT Bagian Simpan Data atau Download Tanda Terima	25
Gambar 10 Menu Informasi Rinci SPPT	26
Gambar 11 Menu Informasi Rinci SPPT Bagian NOP Wajib Pajak	26
Gambar 12 Menu Informasi Rinci SPPT Bagian Cetak Informasi Rinci SPPT	26
Gambar 13 Menu Informasi Pembayaran	27
Gambar 14 Menu Informasi Pembayaran Bagian Memasukkan NOP Wajib Pajak.....	27
Gambar 15 Menu Informasi Pembayaran Bagian Cetak Kurang Bayar	27
Gambar 16 Menu Informasi Pembayaran Bagian Cetak Pembayaran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	33
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	34
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	35
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara mendorong pemerintah menetapkan pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Salah satu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Artinya pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan inilah yang nantinya akan dikelola dan dipergunakan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan pada daerah

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan digunakan sebesar-besarnya bagi keperluan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kota Jakarta berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kabupaten/Kota merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Dikarenakan dengan adanya pengalihan ini, pemerintah Kabupaten/Kota diberikan keleluasaan untuk mengatur atau mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan potensi yang ada diwilayah pemerintahannya. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan PBB-P2 agar mampu memaksimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu membiayai kebutuhan belanja daerah.

Penanganan dan pengelolaan PBB harus dilakukan secara tertib serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara sadar dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan pentingnya PBB sebagai salah satu sumber keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan, pembatalan dan pembetulan itu sendiri, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi bahwa banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang belum paham mekanisme dalam melakukan pembayaran bahkan melakukan pembatalan dan pemetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Oleh karena itu Kantor pelayanan pajak Cipayung yang mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Cipayung. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMBATALAN DAN PEMBETULAN SPPT PBB DI KANTOR PELAYANAN PAJAK CIPAYUNG”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung?
2. Apakah terdapat kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung?

3. Bagaimana solusi dari kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pembatalan dan pembetulan SPPT PBB
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung
3. Penelitian ini hanya membahas mengenai prosedur pembatalan dan pembetulan SPPTPBB di KPP Cipayung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung
2. Untuk mengetahui kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung?
3. solusi dari kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Mekanisme Pembatalan SPPT PBB di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung.
- b. Mendapat pengetahuan lebih mengenai perpajakan di Indonesia
- c. Sebagai bekal bagi penulis dalam menghadapi keadaan nyata dalam dunia kerja sehubungan dengan perpajakan dan mengenal lingkungan kerja perusahaan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas.
- d. Dapat lebih disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan

2. Bagi Universitas

- a. Mambantu universitas meningkatkan kualitas lulusannya dengan pengalaman kerja melalui magang
- b. Dapat menambah popularitas universitas di dunia industri bahkan instansi pemerintah

3. Bagi Perusahaan

- a. Meningkatkan efisiensi waktu pekerjaan dalam perusahaan
- b. Mendapat bantuan dari mahasiswa magang untuk meringankan pekerjaan karyawan perusahaan
- c. Dapat menjalin hubungan dan Kerjasama yang baik dengan universitas dalam dunia pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Pedoman Umum Pengelolaan. Direktorat Jendral Pajak
- Liberti Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan : Berdasarkan UU Terbaru, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 15
- Mardiasmo, Perpajakan. Edisi Revisi. (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 337
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI Offset.
- Priantara, Diaz. 2018. Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap Terkini Disertai CD Praktikum). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rukhmayanti dan Fransisca Widiyanti Oetomo. 2018. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta Media.
- Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 24
- Soparmoko. 2018. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.